

Korupsi dan Gaji dalam Kajian Teoritis

R Maryatmo

HINGAR bingar pro kontra permintaan kenaikan gaji anggota DPR sudah berlalu. Tidak lama berselang presiden SBY mengisyaratkan akan menaikkan gaji pegawai negeri terutama untuk golongan bawah. Kedua usulan tersebut memiliki dasar argumen yang sama. Kenaikan gaji tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan seluruh anggota keluarga, yang selanjutnya dapat memacu produktivitas. Anggota DPR memiliki kebutuhan besar karena mereka harus memasok partai dan biaya sosial yang tinggi. Selanjutnya dapat dipertanyakan apakah kenaikan gaji memacu produktivitas dan meredam korupsi?

Supaya tidak terjadi kesimpangsiuran istilah baiklah jika pengertian korupsi didefinisikan terlebih dahulu. Seperti pendekatan teori ekonomi pada umumnya, diasumsikan hanya ada dua pilihan kegiatan yakni membangun karir atau melakukan tindak korupsi untuk mendapatkan penghasilan. Untuk membangun karir dibutuhkan pencairan seluruh sumberdaya yang dimiliki. Jika pelaku ekonomi membangun karir dengan sungguh-sungguh dan tekun, mereka akan mendapatkan imbalan yang sepentasnya. Gaji yang mereka terima akan sebesar produktivitas marginal mereka. Gaji yang pantas tersebut sebesar produktivitas marginalnya. Jika mereka bekerja dengan penuh untuk mencapai target kinerja, tidak ada lagi sumberdaya yang tersisa untuk melakukan tindakan lain, termasuk tindakan korupsi. Jika seseorang mampu mendapatkan penghasilan lebih tinggi dari produktivitas marginalnya, maka penghasilan ekstra tersebut adalah hasil korupsi, sehingga tindak korupsi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari produktivitas marginalnya.

Dalam dunia yang sempurna seperti di atas, maka semakin tinggi gaji semakin giat pegawai membangun karir semakin tidak ada sumberdaya untuk melakukan kegiatan lain, semakin tidak ada kesempatan untuk melakukan tindak korupsi, sehingga korupsi semakin kecil. Dalam kasus di Indonesia kenaikan gaji tidak selalu meredakan korupsi. Ada berbagai penjelasan mengapa gaji tidak efektif menekan korupsi. *Pertama*, asumsi adanya satu jenis karir perlu dilonggarkan. Jika ada lebih satu jenis karir, maka bukan gaji nominal

yang menentukan tetapi lebih gaji relatif antarjenis karir. Untuk kasus permintaan kenaikan gaji anggota DPR yang akan mendorong tindak korupsi di sini bukan gaji nominal, tetapi gaji relatif. Walaupun gaji nominal naik, tetapi jika gaji relatifnya dibanding gaji di tempat lain menjadi lebih kecil, kecenderungan korupsi akan tetap tinggi. Kecemburuan antara anggota DPR birokrat dan swasta mudah terusik, jika keselarasan tingkat gaji ini tidak diperhatikan.

Kemungkinan kedua orang melakukan tindak korupsi karena gaji lebih rendah dari produktivitas marginalnya, dan bahkan lebih rendah dari kebutuhan untuk memenuhi standar hidup normal. Tidak ada pilihan bagi pelaku ekonomi kecuali mereka harus membagi sumberdaya ekonominya untuk melakukan tindak korupsi dalam rangka untuk mendapatkan penghasilan sampingan. Menggunakan tenaga, dan waktu kerjanya untuk mendapatkan penghasilan sampingan. Di Indonesia ini yang disebut pekerjaan dan penghasilan sampingan merupakan fenomena yang lumrah. Bahkan banyak di antara para pegawai yang penghasilan sampingannya lebih tinggi dari gaji pokoknya. Korupsi dalam pengertian ini merupakan fenomena yang lumrah. Mengapa korupsi harus menjadi bahan tertawaan? Sebuah fenomena yang lumrah dan diterima. Bahkan banyak orang tua yang mengharapkan anaknya dapat bekerja jadi pegawai negeri di departemen yang basah, yang *bledugnya* (penghasilan sampingan) banyak.

Kemungkinan ketiga adalah bahwa sistem karir di Indonesia tidak jalan dengan baik. Pendekatan carrot and stick tidak berlaku. Naik pangkat, mendapat jabatan adalah keberuntungan, bukannya karir yang dapat dibangun yang merupakan carrot dari sebuah upaya keras. Jika kepastian karir masa depan tidak jelas, maka orang mencari alternatif solusi untuk jaminan kesejahteraan masa depan. Jika ada kesempatan untuk melakukan korupsi dengan biaya masa depan karir terhambat tetap akan dilakukan. Pegawai yang potensial yang tidak memiliki harapan karir ke depan akan mencurahkan tenaganya untuk di tempat lain, termasuk korupsi. Beberapa anggota

ter adalah inspanningverbintenis, dimana perikat-

DPR memiliki masa depan yang tidak pasti. Beberapa di antara anggota DPR yang

sebelumnya pengangguran memiliki masa depan yang tidak pasti. Ketidakpastian masa depan yang besar mendorong mereka untuk mencari kepastian dengan cara minta gaji yang tinggi, atau korupsi.

Tidak hanya pendekatan carrot, tetapi stick juga tidak berjalan. Banyak level jabatan, fungsi, dan program yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Jika target tanggungjawab tidak jelas, maka kecenderungan bekerja kurang efisien akan terjadi. Karena tidak ada target yang jelas, ukuran keberhasilan atau kegagalan juga tidak jelas.

Yang paling membuat kondisi pemberantasan korupsi menjadi sulit adalah adanya efek tornado (non-separability) hubungan antara korupsi dan jenjang karir. Awal karir dimulai dengan sogok menyogok. Untuk dapat diterima jadi pegawai, polisi harus menyogok. Untuk dapat lancar naik pangkat harus memberi upeti. Semakin tinggi karir, semakin basah tempat tugas, semakin tinggi

uang sogokan. Meniti karir perlu modal, yang harus dilunaskan ketika mereka menjalani karir. Dari mana uang untuk mengembalikan modal? Korupsi. Semakin tinggi kebutuhan modal, semakin tinggi korupsi untuk mengembalikan modal. Orang melakukan korupsi untuk mendapatkan dana guna meraih kekuasaan yang lebih tinggi. Selanjutnya dengan kekuasaannya tersebut dia mampu mempunyai akses korupsi lebih banyak. Ada lingkaran setan yang tidak putus. Semakin tinggi tentu skalanya semakin besar, bak angin puting beliung.

Terungkapnya penipuan yang mengatasnamakan anggota DPR dengan janji untuk meloloskan pencalonan jabatan tertentu, serta tertangkapnya seorang anggota polisi yang menipu de-

ngan janji mampu meluluskan calon anggota polisi maupun tentara hanyalah fenomena gunung es di negeri ini. Masyarakat dapat ditipu, karena menurut pengalaman-pengalaman yang mereka dengar, setiap suksesi jabatan, kenaikan pangkat selalu dibutuhkan upeti-upeti, uang pelicin untuk memperlancar cita-cita tersebut.

Sikap masyarakat juga mendukung budaya korupsi tersebut. Korupsi butuh keberanian. Koruptor yang berhasil dan ikut membagikan rezekinya adalah pahlawan bagi kelompoknya. Koruptor yang ulung mampu dipercaya memegang jabatan di mana-mana, karena didukung oleh kelompok yang ikut menikmati rezeki tersebut. Koruptor semacam itu walaupun banyak orang tahu bahwa kekayaannya hasil korupsi tetap dihormati. Korupsi tentu berisiko. Supaya risiko semakin kecil, risiko dibagi rata. Jadilah korupsi berjemaah. Semua menikmati, semua ikut menjaga rahasia, semua ikut melawan jika ada yang mau mengusik kepentingan mereka. □ - o

*) *Dr Maryatmo, Dosen di Universitas Atmajaya.*

POJOK KR

DIRGAHAYU REPUBLIK
INDONESIA

Berabe